

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WATU GALANG KECAMATAN MBELILING KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Yuliana Devita Jemia¹, David B.W. Pandie², Jim Briand Kolianan³
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia^{1,2,3}
Email: yannesudy@gmail.com

Keywords

Community Participation, Management, Village Fund.

Abstrak

This study aims to find out the Community Participation in Village Fund Management in Watu Galang Village, Mbeliling District, West Manggarai Regency. This research uses a qualitative method with a type of descriptive approach. This research refers to the theory of Community Participation from Cohen and Uphof (1977) which divides community participation into four stages, namely: Community Participation Planning Stage, Implementation Stage, Results Utilization Stage, and Evaluation Stage. The results of the study show that community participation has not been maximized and tends to vary at each stage. At the planning stage, although participatory principles have been implemented, namely by inviting the community to participate in village development plan deliberations, community involvement in this process is still low. At the implementation stage, it shows more active participation, but unevenly. At the stage of utilizing the results, the community has taken advantage of the results of the village fund program in the field of development and empowerment, but public awareness of program maintenance is still minimal. At the evaluation stage, community involvement is still relatively low due to the lack of understanding of the community and the village government has not maximally provided access to the community to actively participate in the evaluation stage.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk menjadi subjek utama dalam pembangunan. Melalui regulasi ini, desa diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Upaya ini juga diarahkan untuk mengatasi beragam permasalahan pedesaan, seperti

kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan persoalan sosial budaya yang menghambat kemajuan desa.

Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa kepada seluruh desa di Indonesia, termasuk Desa Watu Galang yang berada di Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat. Dana Desa mulai dikururkan sejak tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dana ini diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas lembaga desa. Namun, efektivitas penggunaan dana desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaannya.

Meskipun alokasi dana desa semakin meningkat, partisipasi masyarakat di Desa Watu Galang dalam pengelolaan dana tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini terutama tampak dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa musyawarah desa tidak sepenuhnya melibatkan seluruh elemen masyarakat, melainkan hanya segelintir tokoh atau perwakilan tertentu yang diundang. Praktik ini menyisakan kesenjangan informasi dan menurunkan rasa kepemilikan warga terhadap pembangunan desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan hasil pembangunan juga belum maksimal. Sebagai contoh, sebuah embung air yang dibangun dengan menggunakan dana desa tampak terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Kurangnya keterlibatan warga dalam menjaga dan merawat infrastruktur desa menjadi indikator lemahnya kesadaran kolektif akan pentingnya keberlanjutan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan dana desa tidak hanya terletak pada aspek teknis administratif, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya partisipatif.

Fenomena rendahnya partisipasi ini menimbulkan implikasi penting terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan desa akan kehilangan legitimasi sosialnya dan berisiko gagal memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial yang perlu diintervensi melalui pendekatan edukatif, fasilitatif, dan kebijakan yang inklusif. Proses ini membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan warga desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini

difokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Watu Galang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat. Rumusan ini menjadi dasar untuk menganalisis dinamika partisipasi warga, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dana desa. Fokus ini penting untuk memahami secara holistik bagaimana desa sebagai entitas otonom mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Watu Galang. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Temuan dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan lokal yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis kondisi objek penelitian yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau gambar, yang memiliki makna lebih dari sekadar angka atau frekuensi. Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Watu Galang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, dengan mengkaji aspek-aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dana desa. Data yang diperoleh dianalisis secara menyeluruh, dijelaskan, dan disimpulkan untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Watu Galang dan melibatkan 15 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, terdiri dari Kepala Desa, Pendamping Lokal Desa, perangkat desa, kepala dusun, dan masyarakat desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data mengikuti tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan temuan yang valid dan relevan. Untuk meningkatkan keakuratan temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode, guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari

berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melangsungkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah Desa Watu Galang memiliki beberapa sumber anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara garis besar terdapat tiga sumber anggaran pendapatan yang dimiliki Desa Watu Galang, di antaranya : Pembagian Hasil Pajak (PBH), Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam penelitian ini penulis akan mencoba berfokus pada sumber pendapatan yang kedua yaitu tentang Pengelolaan Dana di Desa Watu Galang. Berikut adalah Dana Desa yang diterima oleh Desa Watu Galang dari Tahun 2021 sampai 2023 beserta rincian penggunaannya :

Tabel 1. Klasifikasi Penggunaan Dana Desa di Desa Watu Galang Tahun 2021-2023

Tahun	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Bidang Pembangunan		Bidang Pemberdayaan		Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	
	Uraian	Rupiah (Rp)	Uraian	Rupiah (Rp)	uraian	Rupiah (Rp)	Uraian	Rupiah (Rp)
2021	Pendataan SDGS	8.150.000	Embung air	72.799.360	Kegiatan STBM	2.586.000	Bantuan Covid 19	52.890.640
	Pengadaan Spanduk APBDES	1.800.000	Fasilitas Posyandu	3.310.000	Bantuan Kelompok Sayur	39.000.000	Bantuan Langsung Tunai	97.200.000
			Bantuan Rumah Layak Huni	380.000.000	Bantuan Kelompok Tenun	2.700.000		
Rp 9.950.000		Rp 456.809.360		Rp 44.286.000		Rp 150.090.640		
2022	Pendataan Profil Desa	3.500.000	Operasional PAUD	56.100.000	Pelatihan eHDW	1.500.000	Bantuan Covid 19	33.632.000
	Pendataan SDGS/IDM	26.798.000	Operasional Posyandu	90.420.000	Bantuan Bibit Jahe	35.000.000	Bantuan Langsung Tunai	140.000.000
	Pengadaan Spanduk APBDES	2.250.000	Pos Kesehatan desa	15.120.000	Bantuan Anak Babi	120.000.000		
	Pengadaa	8.000.0	Rabat	112.535.279	Pelatihan	10.000.000		

	n Web Desa	00	Jalan Dusun Lokot		Pangan Lokal	0		
			Pengadaan Sarana Posyandu	3.000.000	Bantuan Kaum Difabel	6.000.000		
					Pelatihan pengurus BUMDES	2.425.000		
					Pembuatan AD/ART BUMDESS	5.499.721		
		Rp 40.548.000		RP 277.175.279		Rp 180.424.721		Rp 173.632.000
2023	Pendataan Profil Desa	5.000.000	Operasional PAUD	45.978.000	Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak	8.650.000	Bantuan Langsung Tunai	68.400.000
	Pendataan SDHS/IDM	8.600.000	Operasional Posyandu	60.950.000	Kegiatan STBM	6.700.000		
	Operasional Pemerintah Desa	20.384.460	Operasional Bidan	46.232.963	Pengadaan Saprodi	18.400.000		
	Spanduk APBD ES	2.250.000	Poskesdes	280.000.000	Bantuan Bibit Sayur	2.496.400		
Irigasi			100.000.000	Bantuan Anak Pising	19.200.000			
Jalan Tani			116.684.177					
		Rp 36.234.460		Rp 661.345.140		Rp 55.446.400		Rp 68.400.000
Total		Rp 86.732.460		Rp 1.395.329.779		Rp 280.157.121		Rp 392.122.640
%		4,05 %		65,24 %		13,09 %		18,32 %

(sumber Pemerintah Desa Watu Galang 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dana Desa di Desa Watu Galang digunakan ke dalam empat bidang utama yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak. Dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dana desa tersebut lebih banyak di alokasikan ke dalam Bidang Pembangunan yaitu sebesar Rp

1.395.329.779 atau 65,24 % dari seluruh total anggaran. Pada tahun 2021 Desa Watu Galang menerima transfer dana desa sebesar Rp 661.136.000. Pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa berjumlah Rp9.950.000 atau 1,5% dari total anggaran di gunakan untuk Pendataan SDGS desa dan pengadaan spanduk APBDes. Bidang pembangunan mendapat porsi terbesar yaitu Rp 456.809.360 atau 69,11 % dari total anggaran, difokuskan pada operasional PAUD, operasional Posyandu serta bantuan material rumah layak huni. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan sebesar Rp 44.286.000 atau 6,69 % dari total anggaran yang digunakan untuk penyuluhan Kesehatan, Bantuan Bibit Sayur dan bantuan untuk kelompok tenun. Terakhir bidang Benanggulangan Bncana Darurat dan Mendesak Desa menerima Rp 150.090.640 atau 22,71% dari total anggaran yang sebagian besar digunakan untuk Penanganan Covid 19 dan Bantuan Langsung Tunai. Alokasi dana desa ini mencerminkan prioritas desa dalam menghadapi pandemi dan memastikan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap melanjutkan pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Pada tahun 2022 Desa Watu Galang menerima dana desa sebesar Rp 672.180.000. Dana desa ini mengalami kenaikan 1,67 % dari tahun sebelumnya. Anggaran ini juga dibagi ke dalam empat bidang utama. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menerima Rp 40.548.000 atau 6,03% dari total anggaran. Bidang Pembangunan Desa Watu Galang mendapat porsi terbesar yaitu Rp 277.175.279 atau 41,25%. Bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan Rp 180.424.721 atau 26,85% dari total anggaran. Terakhir, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa menerima Rp 173.632.000 atau 25,83% . Adanya peningkatan dalam alokasi untuk penanggulangan bencana dan bantuan langsung tunai menunjukkan respons desa terhadap tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, dana desa yang diterima oleh Desa Watu Galang mengalami peningkatan. Dana desa yang diperoleh yaitu Rp 821.426.000, mengalami kenaikan 22,2 % dari tahun sebelumnya. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa menerima Rp 36.234.460 atau 4,41%. Pada bidang pembangunan sebesar Rp 661.345.140 atau 80,54 % dari total anggaran fokus pada pembangunan infrastruktur seperti poskesdes, pembangunan irigasi, rabat jalan, hingga opeasional PAUD dan Posyandu. Pada bidang pemberdayaan masyarakat Rp 55.446.400 atau 6,75 % dari total anggaran, digunakan untuk sosialisasi kesehatan, bantuan bibit sayur dan anakan pisang. Terakhir bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Rp68.400.000 atau 8,32% dari total

anggaran, digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai. Alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahun mencerminkan prioritas desa dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya peningkatan fokus pada pembangunan irigasi menunjukkan perhatian pada sektor pertanian, sementara bantuan langsung tunai menggambarkan upaya berkelanjutan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Proses pembangunan melalui pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara Desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Watu Galang, penulis menggunakan pembagian partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977), yaitu: a. Tahap Perencanaan. b. Tahap Pelaksanaan. c. Tahap Pemanfaatan Hasil dan d. Tahap Evaluasi

Tahap perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Dalam tahap perencanaan, masyarakat diberi ruang dan kesempatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, siapa yang melakukan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut penulis akan mengkaji proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di desa Watu Galang berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yaitu dikaji berdasarkan keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti musyawarah baik ditingkat dusun maupun tingkat desa, serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan pendapat dan usulan dalam mengikuti proses tahapan perencanaan sebagai berikut:

Keikutsertaan Masyarakat Dalam Rapat Musrebangdes

Tahap pertama yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ini adalah rapat tentang rencana pembangunan desa (Musrenbang). Rapat ini di mulai dari tingkat dusun dengan istilah musdus (musyawarah dusun), dan selanjutnya dilaksanakan ditingkat desa dengan istilah Musdes (Musyawarah Desa). Dalam pelaksanaannya, masyarakat pertama melaksanakan Musyawarah Dusun (MUSDUS) di dusun masing-masing, dan musdus ini melibatkan seluruh elemen dan unsur masyarakat

yang berada di dusun tersebut, seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Musyawarah Dusun

(Sumber Pemerintah Desa Watu Galang 2024)

Dalam proses musyawarah di Desa Watu Galang, identifikasi terhadap potensi dan masalah dilakukan, khususnya pada tingkat dusun. Forum musyawarah dusun menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang kemudian diolah dengan memperhatikan prioritas. Kepala Desa Watu Galang, Bapak Ferdinandus Mboli, menjelaskan bahwa musyawarah dusun adalah langkah awal dalam perencanaan, yang dilanjutkan dengan musyawarah desa untuk membahas anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa. Namun, partisipasi masyarakat dalam musdus didominasi oleh laki-laki, dengan perempuan lebih jarang terlibat, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi diberikan kepada masyarakat, terdapat ketimpangan dalam keterlibatan gender. Setelah musdus, usulan yang dihasilkan dibawa ke musdes, di mana perwakilan dari masyarakat dan kepala dusun menyampaikan hasilnya untuk dibahas lebih lanjut.



Gambar 2. Musyawarah Desa Watu Galang

(Sumber Pemerintah Desa Watu Galang 2024)

Pada saat musyawarah desa, masyarakat yang hadir diundang secara resmi oleh pemerintah desa melalui surat undangan karena acara tersebut bersifat formal. Hanya beberapa unsur masyarakat yang diwajibkan hadir, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Benediktus Nosong, Sekretaris Desa Watu Galang. Berbeda dengan musyawarah dusun (musdus) yang dilakukan secara langsung oleh kepala dusun, musdes melibatkan keterwakilan masyarakat saja, seperti BPD, kader posyandu, dan kelompok difabel. Hal ini diakui oleh Bapak Petrus Mata Reka, seorang tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa semua aspirasi masyarakat sudah dirampungkan sebelumnya di musdus, dan dalam musyawarah desa, hanya usulan prioritas yang disampaikan oleh kepala dusun. Meskipun demikian, kehadiran dalam musyawarah desa tidak sepenuhnya mencakup seluruh masyarakat, yang tercermin dalam daftar hadir yang diambil penulis.

No	KELOMPOK	IR	SAKETAN	ALAMAT	DAFTAR HADIR
1	Bapak Agus Lestari	L	Kandi Doro
2	...	L
3	...	L
4	...	L
5	...	L
6	...	L
7	...	L
8	...	L
9	...	L
10	...	L
11	...	L
12	...	L
13	...	L
14	...	L
15	...	L
16	...	L
17	...	L
18	...	L
19	...	L
20	...	L
21	...	L
22	...	L
23	...	L
24	...	L
25	...	L
26	...	L
27	...	L
28	...	L
29	...	L
30	...	L
31	...	L
32	...	L
33	...	L
34	...	L
35	...	L
36	...	L
37	...	L
38	...	L
39	...	L
40	...	L
41	...	L
42	...	L
43	...	L
44	...	L
45	...	L

Gambar 3. Daftar Hadir Musyawarah Desa (sumber pemerintah Desa Watu galang 2024)

Pada gambar di atas terlihat bahwa masih terdapat kolom daftar hadir yang kosong, mencatat hanya 34 peserta dari total undangan yang berjumlah 60 orang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ferdinandus Mboli, Sekretaris Desa Watu Galang, meskipun sebanyak 60 orang diundang, kehadiran masyarakat pada musyawarah desa (musdes) umumnya hanya mencapai 30 hingga 40 orang. Beberapa alasan ketidakhadiran masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Florianus Adi, adalah kesibukan pekerjaan, terutama karena mayoritas warga adalah petani yang lebih memilih bekerja di kebun atau sawah saat musdes berlangsung. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Petrus Mata Reka yang menyatakan bahwa pemuda di desa ini

sering tidak hadir karena banyak yang merantau atau bekerja. Meskipun demikian, beberapa warga, seperti Ibu Magdalena Luju, pernah mengikuti musdes meskipun terkendala kesibukan lain. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada partisipasi dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa, tingkat keterlibatan masyarakat masih terbatas, dengan alasan pekerjaan yang lebih mendesak. Namun, masyarakat tetap berusaha berpartisipasi dengan memberikan usulan melalui forum formal maupun informal, seperti saat bertemu di kebun atau di jalan. Partisipasi aktif sangat bervariasi, dengan sebagian besar warga datang hanya untuk mendengarkan tanpa memberikan banyak komentar.

Tahap pelaksanaan

Setelah tahap perencanaan selesai maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan. Hasil keputusan berupa usulan-usulan dari masyarakat tentang apa saja yang perlu dibangun dan diselenggarakan di desa Watu Galang terbulatkan dan siap untuk dilaksanakan. Tahap pelaksanaan ini merupakan puncak dari Proses dimana akan terbangunnya sarana kepentingan bersama untuk itu sangat dianjurkan untuk pelaksanaannya di kerjakan sendiri oleh masyarakat di desa tersebut, untuk lebih menguatkan rasa kebersamaan, gotong-royong, serta dapat membantu masyarakat di desa itu sendiri dengan upah yang diperoleh sebagai tenaga kerja dalam pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat Desa Watu Galang dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dapat dilihat dalam bentuk sumbangan materi dan tenaga.

Kontribusi Tenaga

Kontribusi dengan tenaga dalam tahap pelaksanaan merupakan salah satu bentuk keterlibatan langsung warga dalam mewujudkan program atau kebijakan yang telah direncanakan. Bentuk partisipasi ini melibatkan masyarakat memberikan waktu dan energi mereka untuk mendukung implementasi program. Kontribusi tenaga ini tidak hanya membantu mengurangi biaya pelaksanaan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberhasilan program. Selain itu, keterlibatan langsung ini dapat menambah semangat gotong royong dalam komunitas, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru.



Gambar 4. Pembangunan Rabat Jalan

(sumber Pemerintah Desa Watu Galang 2024)

Gambar di atas menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi di Desa Watu Galang, dengan warga desa bekerja bersama-sama membangun jalan. Dalam pelaksanaan kegiatan program di desa, masyarakat dilibatkan sepenuhnya, baik dalam pekerjaan fisik maupun pemberdayaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ferdinandus Mboli, Kepala Desa Watu Galang, masyarakat di setiap dusun dilibatkan dalam pekerjaan fisik dengan pembagian tugas sesuai keahlian, dan mereka dibayar sesuai porsi tugasnya, sementara bahan-bahan yang tidak dapat diperoleh di desa disediakan oleh pihak ketiga. Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Florianus Adi, yang menyebutkan bahwa semua proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan dan saluran irigasi, dikerjakan oleh warga desa sendiri. Selain itu, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga meliputi program pemberdayaan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imanuel Miun, yang menyebutkan bahwa bantuan bibit sayur dan anakan pisang dari pemerintah diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk ditanam di kebun mereka. Meskipun ada sebagian warga yang tidak dapat terlibat karena kesibukan, secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan menunjukkan komitmen dan budaya gotong royong yang kuat di desa ini.

Kontribusi Material

Kontribusi material dalam tahap pelaksanaan program pembangunan di Desa Watu Galang menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti menyumbangkan peralatan kerja, bahan bangunan, dan bahkan makanan untuk para pekerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tadeus Jehola, masyarakat tidak hanya memberikan tenaga tetapi juga membawa peralatan yang diperlukan, seperti

cangkul, parang, dan sekop. Selain itu, Bapak Rofinus Subianto mengungkapkan bahwa beberapa warga menyumbangkan kayu dari kebun mereka untuk mendukung proyek pembangunan, sementara Bapak Florianus Adi menyumbangkan papan untuk pembangunan rabat jalan. Ibu Yustina Limas juga menyatakan bahwa para ibu memberikan sumbangan makanan dan minuman untuk mendukung pekerja. Kontribusi material ini memperkuat semangat gotong royong di desa dan memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka, baik dalam bentuk fisik maupun barang, yang pada akhirnya mengurangi biaya pelaksanaan program dan memaksimalkan sumber daya lokal untuk kemajuan desa.

Tahap Pemanfaatan Hasil

Pemanfaatan program

Setelah tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa terselesaikan maka di tahap selanjutnya adalah tentang pemanfaatan. Tahap pemanfaatan adalah fungsi dan guna pembangunan dan pemberdayaan yang sudah dilakukan, bagaimana kegunaannya untuk masyarakat, apakah sudah mencukupi kebutuhan yang diinginkan masyarakat atau tidak.



Gambar 5. Pembangunan Poskesdes

Gambar di atas merupakan poskesdes yang telah di bangun di desa Watu Galang, yang memiliki luas 90m². Poskesdes tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan seperti posyandu dan kegiatan di bidang Kesehatan lainnya. Pada gambar di atas terlihat beberapa masyarakat melakukan aktivitas di dalam ruangan poskesdes.



Gambar 6. Pembangunan Rabat Jalan

Gambar di atas merupakan rabat jalan yang telah di bangun di desa Watu Galang tepatnya di Dusun Lokot. Rabat jalan ini terbuat dari campuran semen, pasir dan kerikil yang diratakan di atas permukaan jalan. Dengan pembangunan rabat jalan ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena tidak melewati jalan berbatu lagi. Jadi, masyarakat



sekarang tidak perlu cemas saat berkendara melewati jalan karena sudah diperbaiki oleh pemerintah desa.

Gambar 7. Pembangunan Irigasi



Gambar 8. Pembangunan Jalan Tani

Keterlibatan masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil program Dana Desa di Desa Watu Galang terlihat jelas melalui berbagai manfaat yang dirasakan langsung oleh warga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Benediktus Nosong, Sekretaris Desa, berbagai program pembangunan seperti jalan tani, rabat jalan desa, Poskesdes, Gedung PAUD, dan saluran irigasi telah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bapak Emanuel Miun juga mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tani sangat membantu para petani, karena sebelumnya mereka kesulitan mengakses kebun, tetapi setelah ada jalan tani, akses menjadi lebih mudah dan produktivitas meningkat. Selain itu, Ibu Katarina Dabung yang menerima bantuan rumah layak huni, mengaku sangat terbantu dengan program ini, sehingga ia kini bisa tinggal di rumah yang lebih baik. Selain itu, bantuan bibit sayur juga mengurangi biaya hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Watu Galang tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan, tetapi juga merasakan manfaat langsung dari berbagai program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan.

Pemeliharaan Program

Pemeliharaan program pembangunan di Desa Watu Galang masih menghadapi tantangan terkait partisipasi masyarakat. Meskipun masyarakat telah merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur, seperti rumah adat dan embung air, kesadaran untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah ada masih rendah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Saru, Pendamping Lokal Desa, beberapa fasilitas tidak terawat dengan baik, seperti rumah adat yang digunakan untuk tempat ternak, dan embung air yang dipenuhi lumpur tanpa dibersihkan. Bapak Wihelminus Yakin,

Kepala Dusun Nara, juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas, mengingat pembangunan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Ibu Magdalena Luju, salah satu warga, mengungkapkan bahwa meskipun kerja bakti sering dilakukan, tidak semua warga berpartisipasi. Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan program pembangunan masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat pembangunan yang telah dilakukan.

Tahap Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Dana Desa di Desa Watu Galang masih terbatas, karena proses evaluasi tidak dijadwalkan secara khusus. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Watu Galang, Bapak Ferdinandus Mboli, hanya sedikit tokoh masyarakat yang terlibat dalam memberikan pandangan terkait program yang telah dilaksanakan. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Nara, Bapak Rofinus Subrianto, yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam evaluasi masih rendah karena kurangnya agenda khusus untuk kegiatan evaluasi. Meskipun demikian, beberapa warga aktif memberikan kritik dan saran kepada pemerintah desa, seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, Bapak Petrus Matareka, yang mengkritik program yang tidak sesuai dengan rencana dan memberi masukan untuk memperbaikinya. Bapak Gualbertus Jeneta juga memberikan kritik terkait program yang terlambat selesai, seperti pembangunan Poskesdes. Pemerintah desa, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ferdinandus Mboli, menerima masukan dan kritik dari masyarakat dengan baik dan menganggapnya sebagai langkah penting untuk perbaikan program di masa mendatang. Evaluasi yang dilakukan di Desa Watu Galang lebih fokus pada hasil dan pelaksanaan program, namun partisipasi masyarakat dalam evaluasi perlu ditingkatkan agar program yang akan datang dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Watu Galang Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat dalam bentuk kehadiran masyarakat dalam setiap rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrebangdes), baik pada

tingkat dusun maupun di tingkat desa serta dengan memberikan usulan-usulan terkait dengan pengelolaan dana desa, namun partisipasi masyarakat Desa Watu Galang dalam tahap ini masih rendah, pada saat musdus yang hadir didominasi oleh laki-laki. Pada Tahap Pelaksanaan, partisipasi masyarakat terlihat lebih aktif, dengan kontribusi baik dalam bentuk tenaga maupun material. Masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan baik pada bidang pembangunan maupun pada bidang pemberdayaan. Namun, bentuk partisipasi ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat, dengan beberapa kelompok masyarakat masih kurang terlibat karena berbagai faktor seperti kesibukan dan pekerjaan. Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat telah memanfaatkan hasil program dana desa. Pada pembangunan fisik masyarakat memanfaatkan berbagai infrastruktur seperti jalan tani yang telah memberikan manfaat khususnya bagi para petani. Pada bidang pemberdayaan masyarakat juga telah melaksanakan program-program dari pemerintah desa. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan program masih rendah, ada beberapa pembangunan yang tidak terawat. Pada Tahap Evaluasi, bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan memberikan kritik dan saran, namun keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah disebabkan ketidakpahaman masyarakat serta pemerintah Desa juga belum maksimal memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tahap evaluasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Basri dan Subri. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Cohen and Uphoff. (1977). *Feasibility and Application of Rural Development Participate*, Corner University : Ithaca
- H.B. Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press, Depok.
- Kuncoro. (2010) *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Palupi, Sri dkk.(2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Moleong, Lexy. J. M.A. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PTRemaja Rosdakarya.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Slamet M. (2003). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarti. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Semarang : Jurnal Tata Loka. Planologi UNDIP
- Todaro P.Michael dan Smith CS. (1983) *Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Erlangga
- R.A Santoso Sastropetro (1998). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- H. Bintoro Tjokroamidjojo (1992). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta : CV Haji Masagung
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Ahyani, Khairu Syifa., Asep Hidayat, Fitri Pebriani Wahyu, Administrasi Publik, U. S. G. D. B. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4907–4920.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2829/283> 9

- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 45–49.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/963>
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Nisak, H., Karyadi, L. W., & Parama, I. D. M. S. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)*, 4(1), 175–188.
- Saputra, H. P., Muktasam, M., & Chaniago, D. S. (2020). Studi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(2), 221–238.
<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i2.19>

Internet

Cohen J. M and Uphoff N. *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Ithaca, NY: Rural Development Committee, Cornell University, 1977. Diakses pada Mey 28, 2024.

https://www.researchgate.net/publication/37882394_Rural_Development_Participation_Concept_and_Measures_for_Project_Design_Implementation_and_Evaluation

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerinta Desa

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.